

ABSTRAK

PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

Iwan Kurniawan (2210622023), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri Wahyudi

Indonesia merupakan negara dengan bangsa yang besar dan beragam yang terdiri dari banyak pulau dan dari banyak budaya maupun adat istiadat yang di miliki. Dan daripada bangsa ini hidup dan diatur berdasarkan norma dan peraturan yang ada dan hidup di antara mereka sehingga membuat bangsa ini menjunjung tinggi suatu hukum yang mengatur daripada tatanan bermasyarakat, inilah mengapa Indonesia dapat di katakan sebagai negara hukum (*rechstat*), argumen ini dipertegas juga pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang dasar 1945 yang mana menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Ada empat sistem dalam Peradilan di Indonesia yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara. Sistem-sistem ini berdiri secara independen, terpisah satu dengan lainnya dan memiliki fungsi serta wewenang mutlak dalam menjalankan tugas. Sehingga masing-masing sistem memiliki yurisdiksi yang tidak dapat diintervensi oleh sistem peradilan lainnya.

Akan tetapi walaupun Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang melanggar dan tidak mematuhi hukum yang berlaku dan atau bertindak sewenang – wenang dan tanpa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, ini di tandai dari banyaknya kasus – kasus yang terjadi dan pelaku bukan hanya dari orang biasa namun kadangkala tindak pidana itu ada berbarengan dalam perbuatannya dengan anggota Militer atau yang biasa disebut sebagai TNI atau Tentara Nasional Republik Indonesia. Adanya kenyataan bahwa anggota TNI ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat dimana dengan status Istimewanya ditambah dorongan untuk meningkatkan taraf hidup atau motif ekonomi banyak diantara mereka melakukan tindak pidana bersama dengan masyarakat sipil baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan dan dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota TNI dan sipil secara bersama-sama banyak menemui masalah dalam penanganannya. Berkaitan dengan hal diatas maka untuk efektifitas penanganan perkara koneksitas (pelaku melibatkan anggota TNI dan Sipil) kemudian dibentuk lembaga/organisasi khusus pada Kejaksaan RI yakni Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer.

Kata Kunci: negara hukum, sistem peradilan, tindak pidana, pelaku, koneksitas.

ABSTRACT

CONNECTIVITY CASE A JURIDICAL REVIEW OF THE HANDLING PROCESS BEFORE AND AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE ATTORNEY GENERAL IN THE MILITARY CRIMINAL FIELD

Iwan Kurniawan (2210622023), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri Wahyudi

This Indonesia is a country with a large and diverse population, consisting of many islands and a multitude of cultures and customs. The people of this nation live and operate according to existing norms and regulations, coexisting within their midst, which upholds a high regard for a legal system governing societal order. This is why Indonesia can be referred to as a legal state (rechtsstaat), a notion further solidified by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which declares Indonesia as a legal state. There are four systems of justice in Indonesia: general courts, religious courts, military courts, and administrative courts. These systems stand independently, separate from one another, each with its own functions and absolute authority in carrying out its duties. Thus, each system possesses jurisdiction that cannot be interfered with by other judicial systems. However, despite Indonesia's respect for the law, there are also many Indonesians who violate and disregard the laws in place, acting arbitrarily and without adherence to regulations and existing laws. This is evidenced by the numerous cases that occur, with perpetrators not only being ordinary citizens but sometimes also engaging in criminal acts alongside military personnel, commonly known as the TNI or the Indonesian National Armed Forces. The fact that TNI members exist and live among the civilian population, with their special status, combined with the drive to improve their standard of living or economic motives, leads many of them to engage in criminal activities with civilians, whether as perpetrators, accomplices, or assistants. In several cases involving both TNI members and civilians, they encounter difficulties in their handling. In connection with the above, to enhance the effectiveness of handling connectivity cases (involving perpetrators from both the TNI and civilians), a special institution/organization was established within the Indonesian Attorney General's Office, namely the Deputy Attorney General for Military Crime Affairs.

Keywords: state, judiciary system, criminal offenses, perpetrators, connectivity.